

UPAYA PT KALBE FARMA DALAM MENGADOPSI PRINSIP *UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT* SEBAGAI SUATU BENTUK GLOBAL PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (2019-2023)

Alifia Desy Ramadhani

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: 20044010140@student.upnjatim.ac.id

Adiasri Putri Purbantina, Ph.D

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: adiasri.hi@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas upaya PT Kalbe Farma Tbk dalam mengadopsi prinsip-prinsip United Nations Global Compact (UNGC) sebagai bentuk kemitraan publik-swasta global (Global Public-Private Partnership, GPPP) antara tahun 2019 hingga 2023. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat di tengah ketidakpastian global, penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi perusahaan dalam implementasi prinsip-prinsip UNGC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Kalbe Farma telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, meskipun terdapat keterbatasan dalam cakupan implementasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan mitra internasional dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: PT Kalbe Farma, United Nations Global Compact, kemitraan publik-swasta global, keberlanjutan, tanggung jawab sosial.

ABSTRACT

This study discusses the efforts of PT Kalbe Farma Tbk in adopting the principles of the United Nations Global Compact (UNGC) as a form of Global Public-Private Partnership (GPPP) from 2019 to 2023. In the context of Indonesia's strong economic growth amid global uncertainties, this research employs a descriptive method to explore the challenges and obstacles faced by the company in implementing UNGC principles. The findings indicate that PT Kalbe Farma has undertaken various initiatives to support sustainability and social responsibility, although there are limitations in the scope of implementation. This study also highlights the importance of collaboration with international partners in achieving sustainable development goals. Keywords: UN Global Compact; Global Public-Private Partnership; PT Kalbe Farma Tbk; Commitment of Progress

Keywords: PT Kalbe Farma, United Nations Global Compact, global public-private partnership, sustainability, social responsibility.

PENDAHULUAN

Negara dan pelaku swasta semakin terhubung satu sama lain dalam bentuk multilateralisme baru, yang disebut "market multilateralism". Market multilateralism sebagai suatu bentuk pemerintahan akhir-akhir ini menjadi topik penting untuk dibahas dalam isu-isu hubungan internasional. Melalui Global Public-Private Partnership (GPPP), hal ini dapat berkontribusi dalam memperkuat berbagai pengetahuan dan kapasitas; menyempurnakan norms and standards dalam kegiatan usaha; memobilisasi sumber daya dari berbagai aktor; dan berkontribusi terhadap perubahan praktik di pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat secara luas, selain mereka yang terlibat langsung dalam GPPP. Istilah "Global Public-Private Partnership" sekarang menjadi bagian yang tidak asing lagi dalam tata kelola global. Namun demikian, tidak ada definisi hukum tunggal mengenai apa itu GPPP. GPPP adalah hubungan kolaboratif transnasional dengan berbagai tingkat keabadian dan pelembagaan, yang melibatkan negara dan beragam aktor non-negara, yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan publik.

United Nations Global Compact (UNGC) adalah inisiatif sukarela yang didirikan pada tahun 2000 setelah pidato Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan di Forum Ekonomi Dunia pada tahun 1999. Tujuannya adalah untuk memulai dialog dengan dunia usaha dan menggerakkan PBB menuju peran yang lebih proaktif dengan melibatkan bisnis sebagai bagian dari solusi (Kell, 2013; Rasche, 2010). Oleh karena itu UNGC menyerukan, Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk menyelaraskan operasi dan strategi mereka dengan 10 prinsip yang diakui secara luas di bidang hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan anti-korupsi untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan lain-lainnya (lihat UNDP, 2015), dengan fokus pada kerja sama dan inovasi" (lebih lanjut di UNGC, 2020c; RELX, 2020). Hal ini merupakan seruan kepada bisnis di seluruh dunia untuk membantu membangun kerangka kerja sosial dan lingkungan untuk mendukung dan memastikan kelanjutan pasar terbuka dan bebas sambil memastikan bahwa masyarakat di mana pun memiliki kesempatan untuk berbagi manfaat dari ekonomi global yang baru (IOE, 2020).

Kalbe Farma Tbk merupakan sebuah perusahaan multinasional yang beroperasi dari Jakarta, Indonesia, dan berdiri sejak tahun 1966. Fokus utama perusahaan ini adalah produksi obat-obatan, nutraceuticals, nutrisi, dan pelayanan kesehatan (IdFlmCenter, 2000a). Dengan kantor pusatnya yang terletak di Indonesia, Kalbe Farma Tbk terbagi menjadi empat segmen bisnis, yaitu obat resep, produk kesehatan, produk nutrisi, dan distribusi serta logistik. Enam bersaudara Khou adalah para pendiri perusahaan ini. Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini dipasarkan di 43 negara di lima benua. Visi PT Kalbe Farma Tbk adalah menjadi perusahaan kesehatan terkemuka Indonesia secara global, dengan dukungan dari inovasi, merek yang kuat, dan tim manajemen yang kompeten. Misi perusahaan adalah meningkatkan kesehatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik (Kalbe, 2019).

Mengapa implementasi UNGC sangat terbatas? Apa yang telah terjadi dan bentuk-bentuk yang telah diambil? Dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan implementasi UNGC? Artikel ini berusaha untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini dengan mengeksplorasi jalur dan hambatan implementasi UNGC dengan mengacu pada perusahaan multilateralisme yaitu PT Kalbe Farma, sebuah perusahaan yang telah membuat beberapa kemajuan terbatas dalam mengimplementasikan UNGC. Teori Global Private Public Partnership yang mendasari UNGC menekankan peran sosialisasi melalui jaringan pembelajaran kolaboratif berbasis elit dalam mempromosikan prinsip-prinsip UNGC.

Dalam menyajikan argumen ini, kami mulai dengan menguraikan pendekatan kami untuk memahami pendorong dan hambatan teori GPPP. Kami kemudian menggunakan pendekatan ini untuk mengeksplorasi norma dan standar. Kami menyimpulkan artikel ini dengan mempertimbangkan pelajaran dari upaya praktis sebuah perusahaan Indonesia dalam implementasi mematuhi prinsip UNGC dan untuk perdebatan teoritis yang lebih luas tentang keterbatasan perdebatan dan manfaat. Dengan menjalin aliansi strategis bersama mitra internasional, Kalbe telah menerapkan

berbagai inisiatif riset dan pengembangan. Ini melibatkan kegiatan penelitian terkini dalam bidang pengiriman obat, obat antikanker, sel tubuh, dan bioteknologi.

Salah satu upaya Kalbe Farma dalam mencapai keberlanjutan adalah dengan menjadi anggota United Nations Global Compact pada tahun 2019. Penandatanganan perjanjian tersebut diratifikasi melalui Commitment Letter pada tanggal 16 April 2019. PT Kalbe Farma Tbk memiliki keanggotaan 'active' di UNGC hingga saat ini. Literatur yang membahas terkait perusahaan multinasional dalam keanggotaannya dengan GPPP tipe Private Policy Partnership yaitu United Nations Global Compact yang berupaya mematuhi norms and standards dari prinsip-prinsip UNGC belum terlalu banyak.

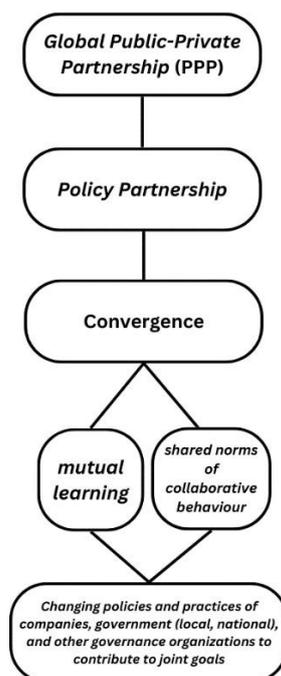
Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas terkait "Akuntabilitas aktor privat dalam rezim internasional yaitu United Nations Global Compact" yang ditulis oleh peneliti Wahyudi Purnomo, Novita Putri Rudiana, dan Citra Hennida (Purnomo et al., 2017). Penelitian yang berjudul "'Bluewashing' the Firm? Voluntary Regulations, Program Design, and Member Compliance with the United Nations Global Compact" membahas bagaimana UN Global Compact sebagai sebuah program sukarela memantau dan menegakkan hukum yang ketat, bagi para pesertanya untuk mematuhi kewajiban program (Berliner & Prakash, 2015). Penelitian dari (Baumann-Pauly & Scherer, 2013) yang berjudul "The Organizational Implementation of Corporate Citizenship: An Assessment Tool and its Application at UN Global Compact Participants" membahas mengenai bagaimana inisiatif tata kelola global seperti UNGC dapat mendukung implementasi Corporate Citizenship (CC).

Penelitian dari (Andi Sufrina Nur Utami, 2019) berjudul "Asia - Pacific Space Cooperation Organization (Apsco) Sebagai Strategi Tiongkok Membentuk Confidence Building Measure Di Kawasan Asia Pasifik" membahas mengenai Bagaimana model kerja sama regional yang diprakarsai oleh Tiongkok dan mencakup delapan negara, termasuk Thailand, Turki, Peru, Mongolia, Pakistan, Iran, Tiongkok, dan Bangladesh. Judul penelitian ini adalah 'Peningkatan Manajemen Kepatuhan dan Promosi Pembangunan

Berkelanjutan dalam Investasi Luar Negeri oleh Perusahaan Tiongkok'. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana mengelola kepatuhan di perusahaan yang saat ini sedang mendunia dengan memperkuat manajemen kepatuhan oleh perusahaan-perusahaan Cina (Wang & Miao, 2023). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana perusahaan multinasional yaitu PT Kalbe Farma Tbk mengadopsi 10 prinsip United Nations Global Compact (UNGC) sebagai bentuk implementasi kemitraannya dengan Global Public-Private Partnership (GPPP) Tahun 2019-2023.

KERANGKA BERPIKIR

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir



Sumber: Penulis

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan PPP sebagai: "Hubungan sukarela dan kolaboratif antara berbagai pihak, baik Negara maupun non-Negara, di mana semua peserta setuju untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama atau melakukan tugas tertentu dan berbagi risks, responsibilities, resources. and benefits" (United Nations, 2005). Menurut Bull dan Mcneill, Public-Private Partnership terlibat

dalam menetapkan kebijakan, merumuskan kebijakan, tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan lingkungan, perlindungan hak asasi manusia, standar tenaga kerja, antikorupsi, bantuan kemanusiaan, dan lainnya (Bull & McNeill, 2019). Negara dan aktor swasta semakin saling terkait dalam apa yang yang diklaim sebagai bentuk baru multilateralisme, yang disebut sebagai 'market multilateralism'. Global Public-Private Partnership (GPPP) sebagai bentuk baru multilateralisme, yang disebut sebagai 'Market Multilateralism'. Global Public-Private Partnership adalah hubungan kolaboratif transnasional, dengan berbagai tingkat keabadian dan pelembagaan, yang melibatkan negara dan beragam aktor non-negara, yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan publik (Aziz, 2012).

Definisi GPPP (Global Public-Private Partnership) adalah mekanisme tata kelola yang dirancang untuk mendorong kerja sama antara organisasi antar pemerintah internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan perusahaan swasta (Farquharson et al., 2011). GPPP dianggap sebagai contoh tata kelola berbagai pemangku kepentingan yang sejalan dengan Tujuan SDGs 17, yang bertujuan untuk mendorong kemitraan yang efektif, termasuk kemitraan publik-swasta. GPPP adalah mekanisme tata kelola untuk mendorong kerja sama Public-Private Partnership (PPP) (Partnership British Columbia, 2003) dalam perspektif market multilateralism antara organisasi antar-pemerintah internasional seperti United Nations (UN) dan perusahaan-perusahaan swasta. GPPP merupakan suatu media berbagi penelitian dan pengembangan kemampuan kemudian menghasilkan norma dan standar untuk operasional bisnis (Bull & McNeill, 2007). Dalam sebuah GPPP terdapat lima bentuk partnership. Salah satu tipenya adalah policy partnerships yang terbagi menjadi, dua jenis private dan public policy partnership. Private policy partnership memiliki tujuan untuk mengadopsi dan meningkatkan praktik bisnis yang berkomitmen untuk mengadopsi standarisasi yang diterapkan (Bull & McNeill, 2019).

METODE

Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai fenomena yang terjadi. Fenomena tersebut mencakup perubahan dalam aktivitas, karakteristik, hubungan, persamaan, dan perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya (A. Saeful Bahri et al., 2021). Tujuan dalam penggunaan metode deskriptif adalah untuk menjabarkan apa saja upaya kemitraan yang dilakukan PT Kalbe Farma Tbk dengan United Nations Global Compact (UNGC) sebagai sebuah Global Public-Private Partnership (GPPP) tahun 2019-2023. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode sekunder. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut yang tidak termasuk dalam data sekunder dengan mengumpulkan data sekunder, penulis juga menggunakan sumber yang meliputi buku, majalah, dan penelitian terdahulu.

PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip dari UN Global Compact

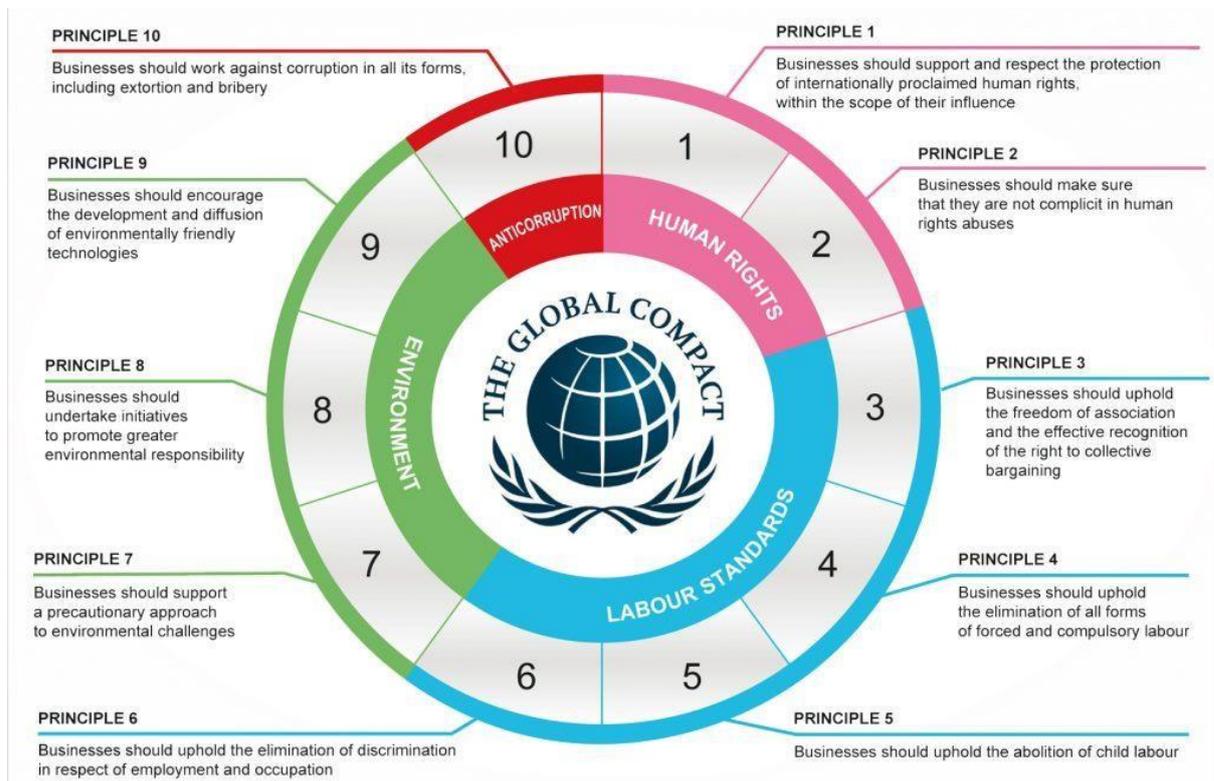
Upaya untuk mengatur perilaku perusahaan telah dilakukan melalui sejumlah mekanisme internasional, salah satu contohnya adalah United Nations Global Compact. Tujuannya adalah untuk memulai dialog dengan dunia usaha dan menggerakkan PBB menuju peran yang lebih proaktif yang melibatkan bisnis sebagai bagian dari solusi (Kell, 2013; Rasche, 2020). Selain dunia usaha, peserta non-bisnis, khususnya serikat pekerja, tetapi juga organisasi non-pemerintah hak asasi manusia dan lingkungan hidup, berpartisipasi dalam UNGC. UNGC adalah inisiatif keberlanjutan perusahaan terbesar di dunia dengan lebih dari 23.824 peserta dari 167 negara (UNGC, 2023c). Misiya juga untuk memobilisasi gerakan global bisnis dan pemangku kepentingan yang berkelanjutan, mempromosikan kegiatan yang berkontribusi terhadap SDGs, dan dengan demikian menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. UNGC bukanlah sebuah alat regulasi. Ini seperti tempat untuk diskusi dan jaringan untuk komunikasi yang melibatkan pemerintah, perusahaan dan organisasi buruh, yang tindakannya bertujuan untuk mempengaruhi. Dengan mengintegrasikan sepuluh prinsip UNGC ke dalam strategi, kebijakan, dan prosedur mereka, serta mengembangkan budaya integritas,

perusahaan menyatakan komitmen dasar mereka terhadap kesejahteraan manusia dan keberlanjutan planet bumi. Ini menciptakan landasan untuk pencapaian keberhasilan jangka panjang (Global Compact Network Canada, 2019).

Tata Kelola Global, Sebagai kemauan individu penanggung jawab perusahaan sukarela terbesar di dunia, UNGC dapat dikatakan menangani tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan multinasional. Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa semua pelaku bisnis peserta bisnis, LSM, tenaga kerja terorganisir, badan-badan PBB dan pemerintah, memberikan kontribusi aktif untuk mencapai tujuan PBB dan prinsip-prinsip UNGC (Kell et al., n.d.). Tujuan utama dari UNGC adalah agar bisnis dan organisasi lain yang berpartisipasi mengintegrasikan, mendukung dan mempromosikan Sepuluh prinsip yang terbagi dalam empat bidang: hak asasi manusia, standar ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan antikorupsi. UNGC terdiri dari sepuluh prinsip yang menentukan sistem nilai dan pendekatan pesertanya dalam menjalankan bisnis. Prinsip-prinsip ini mencakup bidang-bidang seperti Hak Asasi Manusia, yang bersumber dari the Universal Declaration of Human Rights; Standar ketenagakerjaan berdasarkan Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja dari International Labour Organization (ILO); Lingkungan Hidup, yang merujuk pada the Rio Principles on Environment and Development; dan Anti Korupsi, yang bersandar pada UN Convention against Corruption.

Secara umum, para penandatanganan atau peserta UNGC kemudian diwajibkan untuk menjadikan 10 prinsip tersebut sebagai bagian integral dari strategi bisnis dan tindakan mereka sehari-hari (IOE, 2020). Membuat Communication on Progress setiap tahunnya, sebuah pengungkapan publik kepada para pemangku kepentingan (investor, konsumen, masyarakat sipil, pemerintah, dan lainnya) mengenai kemajuan yang telah dicapai dalam mengimplementasikan 10 prinsip dan dalam mendukung UN development goals; yang lebih luas; dan mengadvokasi Global Compact (United Nations Global Compact, 2023).

Gambar 2.1 Sepuluh prinsip dari UN Global Compact



Sumber: (FCCO Construction, n.d.)

Dapat dikatakan bahwa UNGC, sebagai tata kelola global, inisiatif tanggung jawab perusahaan sukarela terbesar di dunia, membahas tanggung jawab sosial dan ekologi perusahaan multinasional. Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa semua pelaku peserta bisnis, LSM, organisasi ketenagakerjaan, badan-badan PBB dan pemerintah, memberikan kontribusi aktif untuk mencapai tujuan PBB dan prinsip-prinsip UNGC (Kell et al., n.d.). Perlu digarisbawahi bahwa, dibandingkan dengan inisiatif lainnya, UNGC memiliki jangkauan geografis yang luas. Oleh karena itu, UNGC juga sering diperkenalkan sebagai bagian dari infrastruktur kelembagaan global yang sedang berkembang untuk tanggung jawab perusahaan (Vogel, 2008; Waddock, 2008). Mengintegrasikan keterlibatan anggota dan menunjukkan kemampuan untuk mendorong prinsip-prinsip ini dalam bidang operasi mereka.

Hak Asasi Manusia

1. Prinsip 1: Perusahaan harus mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia yang diproklamasikan secara internasional.
2. Prinsip 2: Memastikan bahwa bisnis tidak terlibat dalam penyalahgunaan hak asasi manusia.

Tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk membuat bisnis dan organisasi dengan nilai-nilai Global Compact dan Corporate Social Responsibility values (Gonzales-Perez & Leonardo, 2017; UNGC, 2023b). Menghormati hak asasi manusia menunjukkan bahwa sektor bisnis harus berupaya menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Perusahaan juga didorong untuk secara aktif dan positif mendukung serta melindungi hak asasi manusia, baik melalui kegiatan inti bisnis, investasi sosial strategis, filantropi, keterlibatan dalam kebijakan publik, advokasi, kemitraan, dan tindakan kolektif lainnya. Fokus khusus harus diberikan pada hak-hak kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, individu penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja migran, manula, dan sebagainya (UNGC, 2023d).

Ketenagakerjaan

3. Prinsip 3: Perusahaan harus menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan pengakuan atas hak untuk berunding bersama.
4. Prinsip 4: Perusahaan harus menghapuskan segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib.
5. Prinsip 5: Perusahaan harus secara efektif menghapuskan pekerja anak.
6. Prinsip 6: Perusahaan harus menghapuskan diskriminasi dalam hal ketenagakerjaan dan pekerjaan.

Keempat prinsip ini telah ada sejak diadopsinya Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja pada tahun 1988. Deklarasi ini mengacu

pada delapan konvensi yang melibatkan kebebasan berserikat dan berunding, penghapusan kerja paksa, penghapusan kerja paksa secara efektif oleh anak-anak sebelum menyelesaikan wajib belajar, dan pencegahan diskriminasi di tempat kerja. Hak-hak ini bersifat universal untuk semua orang, tidak peduli apa pun tingkat pembangunan ekonomi dan tingkat pembangunan ekonomi dan sosial negara (Gonzales-Perez & Leonardo, 2017; UNGC, 2023a).

Lingkungan Hidup

7. Prinsip 7: Perusahaan harus mendukung pendekatan kehati-hatian terhadap tantangan-tantangan lingkungan.
8. Prinsip 8: Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar.
9. Prinsip 9: Perusahaan harus mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan.

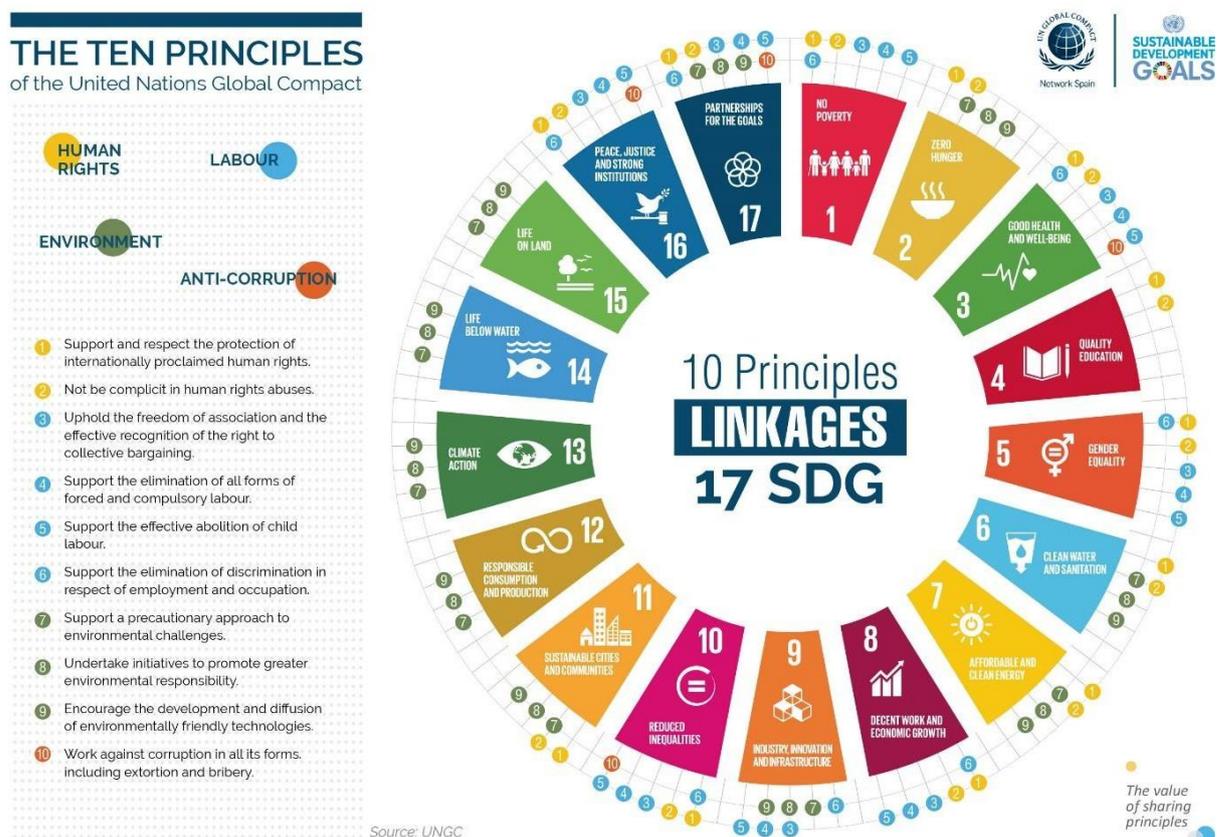
Tiga prinsip lingkungan UNGC mencerminkan fondasi tanggung jawab lingkungan perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut berasal dari Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan yang diadopsi pada tahun 1992, yang terdiri dari banyak prinsip untuk memandu pembangunan berkelanjutan internasional di masa depan dan untuk mengatasi lingkungan seperti perubahan iklim, ketersediaan air minum, polusi, kerusakan ekosistem, produksi limbah, deforestasi, degradasi lahan, dan lainnya (Gonzales-Perez & Leonardo, 2017). Prinsip-prinsip ini mementingkan pendekatan kehati-hatian terhadap lingkungan, sehingga, ketika ada kecurigaan yang beralasan bahaya, para pengambil keputusan perlu menerapkan kehati-hatian dan mempertimbangkan tingkat ketidakamanan yang muncul dari evaluasi ilmiah.

Anti-korupsi

10. Prinsip 10: Perusahaan harus bekerja melawan korupsi dalam segala bentuknya, termasuk pemerasan dan penyuapan.

Prinsip terakhir difokuskan pada tantangan besar lainnya, yaitu korupsi di seluruh dunia. Prinsip ini ditambahkan ke dalam UNGC pada tahun 2004 dan berasal dari Konvensi PBB Melawan Korupsi sebagai alat antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum. Konvensi ini mensyaratkan penerapan langkah-langkah untuk mencegah dan mengkriminalisasi korupsi dari semua anggotanya.

Gambar 2.2 Prinsip-prinsip UNGC dan SDGs



Sumber: (Global Compact Network Canada, 2019)

Meskipun kita dapat melihat sifat dan tujuan yang berbeda dari kedua inisiatif ini, baik UNGC dan SDGs beroperasi di bawah PBB dan oleh karena itu, memiliki beberapa kesamaan dalam hal bagaimana mereka melakukan pendekatan terhadap manajemen

yang bertanggung jawab (Rasche, 2020). Meskipun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, UNGC mencerminkan inisiatif sukarela yang organisasi dapat mendaftar, SDGs tidak mewakili standar atau inisiatif apa pun yang dapat diikuti oleh organisasi, perusahaan, atau negara. SDGs mencerminkan agenda PBB untuk pembangunan berkelanjutan yang harus dipenuhi pada tahun 2030 dan negara dapat hanya dapat mendukung dan mempromosikannya, dengan berperilaku sesuai, untuk mencapainya sedekat mungkin. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, UNGC dan 10 prinsipnya sangat terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGs. Perusahaan yang terlibat, serta organisasi lain, diharapkan untuk berperilaku dan bertindak secara berkelanjutan dan sejalan dengan tujuan-tujuan berkelanjutan ini.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa strategi jangka panjang UNGC adalah untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan bisnis untuk mendukung pencapaian SDG pada tahun 2030 (UNGC, 2023c). UNGC berusaha mencapai tujuannya untuk menyebarkan misi PBB, termasuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan implementasi 10 prinsip dengan mendorong pertumbuhan organisasi penandatanganan, dan melalui membangun jaringan lokal dan dengan mendorong dialog di bidang kebijakan tertentu (Voegtlin & Pless, 2014). Pada Gambar 2, keterkaitan antara 10 prinsip UN Global Compact dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Upaya Keanggotaan PT. Kalbe Farma Tbk

Gambar 3.1 Logo UNGC dan Kalbe



Sumber: (Kalbe Farma, 2023; UNGC, 2023d)

Dengan judul "Bersama, Ayo Sehatkan Bangsa," Kalbe memiliki strategi keberlanjutan yang mencerminkan komitmen perusahaan untuk memenuhi kebutuhan

pemangku kepentingan dan menyampaikan aspek keberlanjutan. Di dalam perusahaan, Kalbe mengadopsi pilar ERAT, yang terdiri dari Etos, Tubuh, Harapan, dan Tindakan (Kalbe Farma, 2023). Di luar perusahaan, Kalbe mengadopsi pilar SEHAT, yang mencakup Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan, Kelestarian Lingkungan dan Ekosistem, Hidup Sehat dan Pendidikan Kesehatan, Penjangkauan Layanan Kesehatan, dan Ekosistem Bisnis Berkelanjutan. Dukungan Kalbe terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui dua belas tujuan, termasuk SDGs 2 hingga 17. Tujuan utama Kalbe adalah mencapai Tujuan ketiga, "Hidup Sehat dan Sejahtera", yang bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat bagi setiap orang di Indonesia dan masyarakat secara keseluruhan.

Kerangka Strategi Keberlanjutan Kalbe

Nilai-nilai utama Kalbe atau visi misi, "Panca Srandha", menanamkan nilai-nilai saling percaya, kesadaran penuh, inovasi, tekad untuk maju, dan saling keterkaitan, yang dianggap penting untuk mencapai kinerja berkelanjutan (Kalbe, 2022). Selain itu, ada semangat "One Kalbe" yang menyatukan seluruh bisnis Kalbe dalam upaya untuk membangun Indonesia yang sehat. Selain itu, Kalbe mematuhi peraturan pemerintah, yaitu: (1) Undang-Undang No.32 pada 2009 mengenai Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2) UU 30 pada 2007 tentang Energi. (3) Peraturan Presiden No. 59 Pada 2017 soal Penerapan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan. (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 04 Pada 1987 mengenai Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (5) Peraturan Pemerintah Nomer 27 Pada 2012 tentang Persetujuan Lingkungan. (6) Peraturan Pemerintah Nomer 47 Pada 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan untuk Perseroan Terbatas. (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 51 Pada 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, serta Perusahaan Publik. (8) Keputusan Menteri ESDM Nomer 1824 Pada 2018 tentang Panduan Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. (9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan Republik

Indonesia Nomer P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 mengenai Rencana Aksi Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Dalam pelaksanaan keberlanjutan Kalbe (Kalbe, 2022b) melakukan kolaborasi dengan konvensi internasional, sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kalbe mendukung pencapaian Tujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua orang, di semua tahap usia.
2. ISO 26000 digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan terkait tanggung jawab sosial.
3. United Nations Global Compact (UNGC) berkomitmen untuk mengintegrasikan operasi dan strategi perusahaan dengan sepuluh prinsip yang terurai dalam empat pilar utama: hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan anti-korupsi.

Moto Pembangunan Berkelanjutan dari Kalbe Farma (Kalbe, 2022b) adalah "Bersama Sehatkan Bangsa"

Pilar Keberlanjutan Kalbe

Penerapan pilar (Kalbe, 2020, 2021, 2022b) SEHAT yakni bukti semangat Kalbe untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pemangku kepentingan eksternal. Semua anak perusahaan terlibat dalam proses pengembangan Pilar SEHAT, yang diawasi oleh Departemen Keberlanjutan Perusahaan dan memiliki tujuan kinerja yang dapat diukur. Dengan SEHAT, Kalbe yakin dapat mewujudkan Visi Perseroan dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui inisiatif "Bersama Sehatkan Bangsa".

1. Sains dan Teknologi Kesehatan

Melalui empat divisi bisnisnya, Kalbe terus berkomitmen untuk mengembangkan solusi kesehatan yang berkelanjutan dan terjangkau. Ini termasuk kegiatan inovasi yang bekerja sama dengan akademisi, bisnis, pemerintah, dan masyarakat, serta pemantauan kualitas produk dan layanan (Quality Control).

Kalbe aktif terlibat dalam kegiatan farmakovigilans untuk menjamin keamanan produk dan keselamatan konsumen. Ini mencakup sosialisasi, membangun sistem, dan menyediakan sumber daya untuk mendeteksi, mengevaluasi, memahami, dan mencegah pelanggaran terhadap hukum. Selain itu, Kalbe terlibat dalam berbagai proyek penelitian, seperti pembuatan produk Novosis, produk biologi antibodi monoklonal, dan pendekatan pemeriksaan genetik terbaru di Indonesia.

2. Ekosistem dan Kelestarian Lingkungan

Kalbe telah menjalankan semua kegiatan produksi dan komersial sesuai dengan regulasi yang berlaku, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap perlindungan lingkungan. Manajemen lingkungan di Kalbe dilaksanakan dengan merujuk pada prinsip Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), dan perusahaan telah menerapkan sistem manajemen lingkungan yang telah bersertifikat ISO 14001:2015.

- Pemakaian Energi Untuk Keperluan Kegiatan Produksi

Untuk menjalankan operasional produksinya, Kalbe menggunakan beberapa sumber daya listrik. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah mitra pihak ketiga yang menyediakan pasokan listrik utamanya. Berbagai mesin, utilitas, dan unit pendukung sistem tata udara bekerja karena energi ini. Untuk mengoperasikan boilernya, Kalbe juga menggunakan tenaga surya dan bahan bakar gas (CNG). Melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang dikelola secara internal dalam skala kecil, Kalbe mendukung pengembangan energi terbarukan dengan cara yang positif.

- Penggunaan Energi pada Unit Usaha Distribusi dan Logistik

PT Enseval Putera Megatrading Tbk (Enseval) dan PT Tri Sapta Jaya adalah dua anak perusahaan yang masing-masing mengelola armada transportasi mereka sendiri dan bekerja sama dengan maskapai mitra untuk mengirimkan produk Kalbe ke distributor dan pelanggan akhir melalui sistem logistik.

Tabel 1.1 Penggunaan Energi untuk Kegiatan Produksi

Jenis Energi	2022	2021	2020	2019
Tidak Dapat Diperbarui				
Scope 2: Listrik dari PLN	11.684,14	9.621,48	7.615,36	7.902,14
Scope 1: Bahan Bakar Gas (CNG)	9.869,29	7.676,61	5.404,14	5.982,09
Scope 1: Bahan Bakar Solar Industri	304,70	818,19	452,66	87,25
Dapat Diperbarui				
Panel Surya	635,31	319,41	31,80	8,25
Total Energi	22.493,43	18.435,69	13.503,56	13.979,73

Sumber: (Kalbe, 2019, 2020, 2021, 2022b)

- **Strategi Efisiensi Energi**
 Dalam kerangka Kalbe Energy Committee, setiap unit bisnis memiliki tim khusus yang berfungsi sebagai gugus tugas energi. Tujuannya adalah untuk membuat semua divisi Kalbe Group setuju tentang prioritas dan prinsip efisiensi energi. Untuk memilih peralatan mekanis dengan emisi rendah dan umur panjang, tim Gugus Tugas Energi akan bekerja sama. Fokus pengadaan mesin tanpa alat dan teknologi semi-robotik.
- **Upaya untuk Energi menjadi Hemat**
 Di tingkat teknis, peningkatan efisiensi energi dicapai dengan memanfaatkan sistem kontrol ventilasi, pemanas, dan pendingin udara (HVAC), serta dengan mengoptimalkan konfigurasi kompresor dan boiler yang diperlukan. Pada akhir tahun 2022, delapan fasilitas manufaktur, termasuk Hexpharm Farma International, Kalbe Farma Cikarang, dan Bintang Toedjoe Cikarang, akan menerima sistem manajemen kontrol HVAC.
- **Pemanfaatan Energi Terbarukan**
 Panel surya adalah cara terbaik untuk menghasilkan listrik untuk lampu jalan dan terhubung langsung ke jaringan listrik. Ini adalah salah satu contoh upaya yang

terus dilakukan untuk mengintegrasikan energi terbarukan. Diproyeksikan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan menghasilkan 6.156 kWp (kilowatt peak) listrik dari tujuh pabrik dan dua gudang pada tahun 2022. Melalui PLTS, Kalbe secara tidak langsung dapat mengurangi emisi sebesar 5.344 ton CO₂.

- Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Kalbe memastikan bahwa emisi dari boiler, pengumpul debu, dan generator darurat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemeliharaan peralatan yang baik, pengujian tingkat emisi yang teratur, dan pelaporan enam bulanan rutin kepada layanan lingkungan setempat memastikan bahwa kemampuan ini dipertahankan. Tetapi Kalbe tidak memperhitungkan emisi fugitive dari penggunaan zat pendingin, emisi tidak langsung lainnya, emisi zat perusak ozon, atau emisi udara penting lainnya.

- Pengelolaan Limbah dan Influen

Jenis dan jumlah sampah menentukan pengelolaan sampah Kalbe. Pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan diizinkan untuk membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip 3R saat ini digunakan dalam pengolahan limbah padat non-B3: mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle). Dengan menggunakan sistem pelaporan elektronik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau aplikasi SIRAJA, Kalbe turut berpartisipasi dalam penilaian PROPER. Sistem ini membantu dan mempermudah pemantauan pengelolaan sampah dan memungkinkan pelacakan dan pemantauan proses dengan lebih mudah dan akurat.

Tabel 1.2 Total Limbah B3 dan Non-B3 yang Dihasilkan (Ton)

Limbah B3 (Ton)	2022	2021	2020	2019
Timbulan Limbah B3	1.059,32	1.088,63	743,40	824,06
Diolah Secara Internal	0	0	0	0
Diserahkan ke Pihak Ketiga	1.059,32	1.088,63	743,40	824,06

Limbah Non-B3 (Ton)	2022	2021	2020	2019
Timbulan Limbah Non-B3	2.800,12	2.618,17	2.035,04	2.286,12
Diolah Secara Internal	22,50	25,50	29,39	54,03
Diserahkan ke Pihak Ketiga	2.681,89	2.592,67	2.005,65	2.232,09

Sumber: (Kalbe, 2019, 2020, 2021, 2022b)

- **Upaya Pengurangan Limbah**
 Program "GregetPlastik" adalah program pengelolaan limbah yang ditawarkan oleh Kalbe sebagai bagian dari Grup Kalbe. Tujuan program adalah untuk mengurangi jumlah sampah plastik. Program ini melibatkan 29 bisnis, 6 SBU, dan 1 CF di 15 lokasi. Pada akhir tahun 2022, perusahaan berhasil mengumpulkan 634,31 kilogram sampah plastik melalui program GregetPlastik, dengan total donasi Rp 1.274.620. Setiap pabrik Kalbe juga telah menerapkan sistem pengelolaan limbah yang lebih baik.
- **Upaya Penghematan Air dan Pengendalian Efluen**
 Kalbe bermaksud untuk menggunakan 1.261.350 m³ air pada tahun 2022 dari sumber air seperti air tanah, PDAM, dan air daur ulang. Untuk menghemat air, mereka telah memasang keran air otomatis di seluruh kantor dan kantor pusat mereka, dan mereka aktif mendukung konservasi air dan mengurangi tingkat pencemaran air di setiap pabrik mereka.
- **Perlindungan Keanekaragaman Hayati**
 Semua fasilitas yang dimiliki oleh Kalbe Group terletak di kawasan industri dan tidak memiliki kontak langsung dengan kawasan publik atau kawasan lindung. Meskipun kegiatan bisnis Kalbe tidak dianggap sebagai ancaman terhadap keanekaragaman hayati, berdasarkan hasil studi yang mengidentifikasi potensi

dampak lingkungan dalam dokumen persetujuan lingkungan hidup, Kalbe terus melaksanakan berbagai aktivitas untuk mendukung dan meningkatkan keanekaragaman hayati.

Tabel 1.3 Aspek Lingkungan

Keterangan	Satuan	2022	2021	2020	2019
Pengurangan Emisi dari Sumber Energi Terbarukan	Ton CO2 eq	5.325,03	2.677,23	266,51	69,15
Konsumsi Energi	Tons of Oil Equivalent	22.493,43	18.435,69	13.503,97	13.979,73
Bauran Energi Terbarukan	%	3,45%	1,73%	0,24%	0,06%
Jumlah Lokasi Plasma Petani Lokal Jahe Merah	Satuan	40	31	34	5
Pengurangan (Penambahan) Air Buangan/Efluen yang Dihasilkan	M ³	24.921	(56.691)	3.246	-
Pengurangan (Penambahan) Limbah B3 yang Dihasilkan	Ton	29,31	(345,23)	80,66	-
Pengurangan (Penambahan) Limbah Non-B3 yang Dihasilkan	Ton	(181,95)	(583,13)	251,08	-
Biaya Pengelolaan Lingkungan	Milliar Rp	21,8	21,6	9,3	7,211

Sumber: (Kalbe, 2019, 2020, 2021, 2022b)

3. Edukasi Kebersihan dan Kesehatan

- Upaya untuk Menjaga Kesehatan dan Keselamatan Pekerjaan Karyawan

Setiap unit bisnis Kalbe memiliki departemen atau fungsi yang bertanggung jawab atas manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di tempat kerja, yang didukung oleh komite pembina bidang keselamatan dan keselamatan kerja (P2K3). Sistem manajemen K3 Kalbe mengikuti standar ISO 45001 dan secara berkala direvisi oleh komite pembina bidang keselamatan dan keselamatan kerja (P2K3).

- **Pelatihan K3**

Kalbe secara teratur memberikan pelatihan dan sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) kepada karyawannya, termasuk saat mempekerjakan karyawan baru. Melalui berbagai kegiatan pelatihan, Divisi HSSE Korporat terus berupaya meningkatkan pengetahuan manajemen dan personel kunci. HSSE Corporation mengadakan enam forum pendidikan online pada tahun 2022 dengan pembicara dari berbagai bidang keahlian.
- **Kinerja Pengamanan Operasional Bisnis**

Tim Keamanan Terpadu Kalbe Group akan memastikan bahwa lingkungan kerja di semua unit Kalbe Group tetap aman dan nyaman selama tahun 2022 dan selanjutnya, bebas dari Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) dari sumber eksternal. Dengan mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan keamanan di area tersebut, termasuk masyarakat sekitar, mekanisme deteksi dini terus ditingkatkan. Sesuai dengan undang-undang kepolisian nasional, pedoman CHSSE, dan pedoman keamanan lainnya, kemampuan personel keamanan terus diperkuat dan dikembangkan.
- **Kinerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Pada tahun 2022, tidak ada kecelakaan, kematian, atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan di kantor pusat atau sebelas lokasi produksi Kalbe. Namun, terdapat 12 kasus dalam kategori pengobatan dan tiga kasus dalam kategori absensi kerja, yang berarti bahwa pekerja (korban) harus mendapatkan perawatan atau dirujuk ke rumah sakit sebelum kembali ke pekerjaan mereka. Setiap peristiwa ini tidak mengganggu operasi unit, dan perbaikan terus dilakukan.

Tabel 1.4 Jumlah Kecelakaan Kerja

Non-Loss Time Accident (Medical Treatment)				Lost Time Accident				Fatal Accident			
2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019
12	13	9	13	0	3	0	0	0	0	0	0

Sumber: (Kalbe, 2019, 2020, 2021, 2022b)

- Dukungan pada Gizi Ibu Hamil dan Balita

PT Sanghiang Perkasa (Kalbe Nutritionals) turut mendukung inisiatif percepatan penurunan stunting di Indonesia melalui kemitraan dengan Universitas YARSI dan Puskesmas Kresek. Dalam rangka memberikan intervensi gizi, program ini melibatkan penggunaan susu prakonsepsi, penyelenggaraan edukasi kesehatan untuk mengurangi stunting, dan pengukuran tingkat kesehatan kepada 67 ibu hamil beserta pengasuhnya setiap bulannya. Aspek edukasi kesehatan tentang pentingnya gizi dalam mengatasi stunting akan disampaikan secara langsung kepada peserta melalui panduan yang berjudul "Pencegahan Stunting Dini, Panduan Ibu Hamil," yang disusun oleh tim gizi dari Kalbe dan Universitas YARSI.

4. Akses Layanan Kesehatan

Untuk memastikan layanan kesehatan yang merata dan luas kepada seluruh pelanggan, Kalbe menggunakan dan mengembangkan teknologi digital. Untuk mencapai tujuan ini, Kalbe telah mendirikan Klinik Mitrasana, yang menawarkan berbagai layanan kesehatan dalam satu tempat, termasuk dokter umum, dokter gigi, fisioterapis, laboratorium, apotek, dan layanan pembelian online produk kesehatan.

- Layanan Kesehatan dalam Aplikasi Terintegrasi

Klikdokter.com, layanan kesehatan bisnis-ke-konsumen Kalbe, didirikan pada tahun 2008 dan telah berkembang menjadi salah satu portal telemedicine terkenal di Indonesia. Klikdokter.com menawarkan berbagai fitur yang berkaitan dengan perawatan kesehatan, seperti materi pendidikan dan informasi tentang kesehatan, toko obat online, reservasi dokter online, konsultasi jarak jauh, resep elektronik, dan pengiriman obat. Kalbe memiliki banyak aplikasi terintegrasi, termasuk KalCare Omi Channel dan KlikDokter.

- Kalbe Customer Care

Seluruh pelanggan Kalbe memiliki kemampuan untuk mengajukan keluhan atau mendapatkan informasi tentang produk dan layanan melalui Layanan Pelanggan Kalbe. Layanan ini melindungi mitra kerja dan pelanggan dengan menerapkan kebijakan bebas pulsa dan privasi, terutama bagi pelanggan yang menggunakan layanan kesehatan elektronik melalui situs web Kalcare.com dan KlikDokter.

Pelanggan juga memiliki opsi untuk mengajukan keluhan secara langsung di gerai KalCare terdekat mereka.

- Survei Kepuasan Pelanggan

Untuk meningkatkan penyampaian produk dan layanan, Kalbe melakukan penilaian kepuasan pelanggan. Hasil survei tentang kepuasan pelanggan berfungsi sebagai petunjuk tentang seberapa baik pelayanan berfungsi dan bagaimana perbaikan dapat dilakukan di masa mendatang. Indeks Kepuasan Pelanggan menilai berbagai aspek layanan bisnis, seperti ketersediaan akses, responsifitas layanan pelanggan, kepatuhan waktu dalam memberikan layanan, akurasi informasi dan solusi, dan aspek keramahan dan kesopanan.

- Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Produk bagi Konsumen

Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Sistem Manajemen Mutu menunjukkan komitmen Kalbe terhadap standar keamanan pangan dan peraturan yang berlaku. Selama pra-pemasaran, peluncuran, dan pasca-pemasaran, Kalbe mengevaluasi kualitas, keuntungan, kesehatan, dan keselamatan produknya. Untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan tidak melebihi masa manfaatnya, Kalbe memiliki standar dan prosedur khusus untuk menangani produk yang telah kedaluwarsa. Selain itu, Kalbe bekerja sama dengan pemasok yang terikat oleh kontrak dan lisensi untuk menjaga agar produk yang dipasarkan tidak melebihi masa manfaatnya. Untuk melindungi kesehatan konsumen dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang, produk yang tidak memenuhi standar atau sudah kedaluwarsa akan dihapus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Pemasaran dan Pelabelan

Dibawah tanggung jawab Fungsi/Divisi Pemasaran, Urusan Regulasi, dan Penelitian dan Pengembangan. Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Produk, Kalbe melaksanakan praktik pemasaran dan pelabelan yang berfokus pada keamanan produk untuk kepuasan pelanggan. Pengelolaan jaminan mutu dalam pelabelan diawasi oleh Grup Kalbe. Kalbe melakukan evaluasi terhadap kemasan

dan pelabelan melalui serangkaian uji stabilitas dan kualitas yang diverifikasi oleh bagian Quality Assurance.

Tabel 1.5 Aspek Sosial

Keterangan	Satuan	2022	2021	2020	2019
Skor Survei Kepuasan Layanan e-Health	Skala 5	4,76	4,63	4,59	4,76
Komposisi Karyawan	%	Laki-laki:	Laki-laki:	Laki-laki:	Laki-laki:
		67%	67%	67%	67,48%
		Perempuan:	Perempuan:	Perempuan:	Perempuan:
		33%	33%	33%	32,52%
Total Jam Pelatihan Per Karyawan Kalbe Group	Jam	195.665	171.615	351.005	11.086

Sumber: (Kalbe, 2019, 2020, 2021, 2022b)

5. Total Ekosistem Bisnis Berkelanjutan

- Kemitraan dalam Rantai Pasok

Untuk memastikan bisnis tetap beroperasi, pemasok atau penjual memainkan peran penting dalam rangkaian pasokan Kalbe. Sistem rantai pasokan yang dikonfigurasi secara online digunakan oleh Kalbe untuk memastikan ketersediaan bahan baku. Setiap minggu, Kalbe secara aktif melacak ketersediaan bahan baku dan memberikan rekomendasi terkait sumber bahan baku serta pemasok alternatif dalam kasus kendala pasokan. Melalui kerja sama dengan anak perusahaan dan kolaborasi dengan mitra bisnis lainnya, Kalbe berkomitmen untuk memastikan integrasi operasional dari hulu hingga hilir.

- Praktik Pengadaan

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip bisnis yang etis, Kalbe menjalankan operasi pengadaannya untuk memastikan produk dikirim dalam jumlah yang tepat, kualitas yang tepat, harga yang terjangkau, dan tepat waktu. Dalam proses pengadaan, transformasi digital terus digunakan untuk membuat proses yang lebih terintegrasi, fleksibel, dan transparan. Dalam proses mencari penyedia

material, perhatian khusus diberikan pada sumber material asli, yang dijamin diperoleh dari negara yang tepat. Supplier Health, Safety, Security, Environment, and Social Assessment (SHSSESA)

- Kinerja Ekonomi

Kinerja ekonomi Kalbe, sejalan dengan komitmen mereka untuk "Bersama Membangun Bangsa yang Sehat", merupakan salah satu pilar utama dalam membangun dan memperkuat keberlanjutan. Direktur keuangan mengawasi dan mencatat kinerja ekonomi perusahaan. Kalbe berhasil mempertahankan kinerja ekonomi dan keuangan yang stabil meskipun menghadapi banyak tantangan. Pendapatan Kalbe diproyeksikan meningkat sebesar 10,2% setiap tahun hingga Rp 28.934 miliar pada tahun 2022. Selama periode pelaporan, penting untuk dicatat bahwa Kalbe tidak menerima bantuan keuangan dari pemerintah.

- Dukungan kepada Petani Jahe Merah Lokal

Bintang Toedjoe membuat program kemitraan jahe merah untuk membantu para petani. Ekosistem memiliki tujuh pilar yang mendukung program: pembibitan, penanaman, pascapanen, ekstraksi dan distilasi, farmakologi komersialisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2022, Bintang Toedjoe bekerja sama dengan lebih dari 10.000 petani di Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Para petani menghasilkan lebih dari 600 ton jahe merah basah, yang merupakan bahan baku utama dari produk jamu PT Bintang Toedjoe. Ini meningkatkan penjualan produk sebesar 21% dan menyumbang 16% dari penjualan produk lokal PT Bintang Toedjoe.

Tabel 1.6 Aspek Ekonomi

Keterangan	Satuan	2022	2021	2020	2019
Penjualan	Milliar Rp	28.934	26.262	23.113	22.633
Pertumbuhan Penjualan	%	10,2	13,6	2,1	7,4
Laba Bersih	Milliar Rp	3.450	3.232	2.866	2.507
Pertumbuhan Laba Bersih	%	6,7	16,5	10,3	11,7
Jumlah Petani Binaan Program Ekosistem Jahe Merah	Orang	10.138	10.257	10.063	570

Sumber: (Kalbe, 2019, 2020, 2021, 2022b)

Implementasi Pilar ERAT

- Pengelolaan Ketenagakerjaan

Untuk mewujudkan komitmen Kalbe untuk "Bersama Membangun Bangsa Sehat", inisiatif internal disusun dan dikomunikasikan melalui empat pilar "ERAT". Pembangunan dan pelaksanaan pilar-pilar ini merupakan komponen penting dari strategi bisnis jangka panjang secara keseluruhan, yang membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Webinar dan diskusi kesehatan, pertukaran inovasi, program kesehatan, dan acara olahraga bersama adalah beberapa dari rencana Kalbe untuk melaksanakan program pada tahun 2022.

Gambar 4.1 Bukti Kegiatan Pilar ERAT



Sumber: (Kalbe Farma, 2023)

Kaitan UNGC dengan Kalbe Farma

Setelah mengetahui Communication on Progress PT Kalbe Farma pada tahun 2019 hingga 2022, Kalbe telah menerapkan kesepuluh prinsip UNGC dengan mengacu pada SDGs (Lihat tabel 1.7). PT Kalbe Farma

1. Meningkatkan daya saing: Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip Global Compact dapat mengalami peningkatan daya saing dalam pasar yang kompetitif. Dibuktikan dengan peningkatan pada laporan Laba Rugi

pada 2018 (sebelum menjadi anggota UNGC) hingga 2022 (saat menjadi anggota UNGC).

Tabel 1.8 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain	2022	2021	2020	2019	2018	In million of Rupiah, unless otherwise stated
Penjualan Neto	28,933,503	26,261,195	23,112,655	22,633,476	21,074,306	Net Sales
Laba Bruto	11,704,066	11,283,784	10,246,322	10,243,468	9,847,926	Gross Profit
Laba sebelum Beban Pajak Penghasilan	4,458,897	4,143,265	3,627,633	3,402,617	3,306,400	Income before Income Tax Expense
Laba Tahun Berjalan	3,450,083	3,232,008	2,799,623	2,537,602	2,497,262	Income for the Year
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:						Income for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	3,382,210	3,183,621	2,733,260	2,506,765	2,457,129	Owners of the Parent Company
Kepentingan Non-pengendali	67,874	48,386	66,363	30,837	40,133	Non-controlling Interests
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	3,513,672	3,208,499	2,865,987	2,513,242	2,552,707	Total Comprehensive Income for the Year
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:						Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	3,446,013	3,159,584	2,797,950	2,482,456	2,510,651	Owners of the Parent Company
Kepentingan Non-pengendali	67,658	48,915	68,037	30,786	42,056	Non-controlling Interests
Rata-Rata Tertimbang Jumlah Saham yang Beredar ^a (dalam jutaan saham)	46,256	46,873	46,873	46,875	46,875	Weighted Average Number of Shares Outstanding ^a (in million of shares)
Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp)	72.71	67.92	58.31	53.48	52.42	Basic Earnings per Share Attributable to Owners of the Parent Company (Rp)

^a setelah dikurangi saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sebesar 619.480.700 after deducting the shares that have been bought back by the Company in the amount of 619,480,700

Sumber: (Kalbe, 2022a)

2. Meningkatkan inovasi: Pengabdian terhadap hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan anti-korupsi dapat mendorong perusahaan untuk lebih inovatif dan menciptakan produk dan layanan yang lebih berkelanjutan. Strategi kalbe adalah terus mengembangkan portofolio usaha Kalbe yang ada serta terus mencari peluang pertumbuhan baru baik melalui inovasi baru, maupun melalui kemitraan strategis serta merger dan akuisisi.
3. Mengurangi ketidakpastian regulasi: Perusahaan yang berkomitmen dalam penerapan prinsip-prinsip Global Compact dapat mengurangi ketidakpastian regulasi dari pemerintah dan dampak buruk krisis iklim.
4. Memperkuat kepercayaan dan kredibilitas investor: Pengabdian terhadap hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan anti-korupsi dapat memperkuat kepercayaan dan kredibilitas investor. Perluasan jaringan juga

menjadi prioritas guna meraih peluang baru di area-area yang belum terlayani, guna menjamin agar produk dan layanan Kalbe dapat mudah dijangkau oleh para pelanggan. Selain itu, perluasan usaha internasional akan dilaksanakan melalui perluasan portofolio produk dan jangkauan geografis di pasar global. Melakukan proses dengan menyempurnakan tata kelola perusahaan, serta juga praktik pengelolaan risiko dan kualitas yang baik, guna melindungi reputasi Perseroan dan mempertahankan keberlanjutan usaha Kalbe

5. Mengurangi dampak buruk lingkungan: Pengabdian terhadap hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan anti-korupsi dapat mengurangi dampak buruk lingkungan dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
6. Meningkatkan akses ke sumber daya dan dukungan: Perusahaan yang bergabung dengan UN Global Compact dapat memperoleh akses ke sumber daya dan dukungan yang lebih baik, seperti sumber daya, teknologi, dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan bisnis digital dalam tahun-tahun terakhir, kalbe berupaya menggandakan upaya memperluas kehadiran dalam ruang digital, melalui fokus pada inovasi untuk memenuhi pesatnya perubahan trend pasar. Secara internal, Kalbe mempercepat proses difusi teknologi digital dalam organisasi, melalui penerapan berbagai teknologi digital unggulan yang baru guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk.
7. Selain itu, perusahaan yang bergabung dengan UN Global Compact juga dapat memperoleh akses ke informasi dan forum-forum dengan partisipasi perusahaan-perusahaan Global Compact, serta dapat mempataki pemerintah, perusahaan, dan organisasi buruh, serta organisasi warga sipil yang mewakili berbagai pemangku kepentingan.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang menjadi anggota UNGC. Misalnya, perusahaan harus menghadapi dampak buruk hak

asasi manusia melalui aktivitas mereka sendiri dan menghormati perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Selain itu, perusahaan juga harus menghadapi keterlibatan yang mungkin terjadi ketika mereka diam atau tidak aktif dalam menghadapi pelanggaran prinsip ketiga UNGC, yaitu bisnis harus menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding. Meskipun ada tantangan, banyak perusahaan terkemuka di dunia yang mendukung UNGC dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kegiatan mereka. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya perusahaan dalam mendorong perubahan dan mengatasi kesalahan dalam bidang tenaga kerja, lingkungan, dan anti-korupsi.

Pemerintah Indonesia menawarkan berbagai program pendanaan kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam United Nations Global Compact (UNGC), dengan tujuan untuk mendorong praktik bisnis berkelanjutan. Salah satunya adalah Akselerator Inovasi SDG untuk Profesional Muda di Indonesia, yang diluncurkan oleh UNGC bagi perusahaan-perusahaan anggotanya untuk mempercepat transisi menuju model bisnis berkelanjutan yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Selain itu, Indonesia Global Compact Network (IGCN) juga berperan sebagai fasilitator implementasi program UNGC di Indonesia. Selain program khusus UNGC, pemerintah juga mendukung dunia usaha, termasuk UMKM, untuk melakukan digitalisasi dan beroperasi secara global melalui berbagai insentif pajak, dukungan, dan program stimulus perekonomian nasional. Melalui berbagai inisiatif ini, Pemerintah bertujuan untuk membantu dunia usaha, termasuk perusahaan anggota UNGC, mempraktikkan praktik bisnis berkelanjutan dan meningkatkan daya saingnya.

Tabel 1.7 Penerapan Prinsip-prinsip UNGC oleh Kalbe Farma yang mengacu pada SDGs

Topik Keberlanjutan	Keselamatan dan Kesehatan Pelanggan				Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		Kinerja Ekonomi				Praktik Pengadaan				Pemasaran dan Pelabelan				Energi				Pendidikan dan Pelatihan				Keberagaman dan Kesetaraan
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2022
SDGs																											
Isu Utama	Mempertahankan serta meningkatkan kepercayaan pelanggan atas produk dan jasa Kalbe sebagai solusi kesehatan.				Menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan agar bersama dapat mewujudkan Indonesia Sehat.		Memastikan pertumbuhan kinerja ekonomi dengan memperhatikan pencapaian pasar, efektivitas dan efisiensi operasi, serta tanggung jawab sosial.				• Mengelola rantai pasokan secara terintegrasi untuk menjamin keberlanjutan pasokan. • Menjamin tidak adanya pekerja maupun pekerja paksa pada praktik pengadaan dan rantai pasok.				Memperkuat sistem kebijakan mutu, perlindungan pelanggan, serta ketersediaan informasi untuk semua produk dan jasa guna menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat/pelanggan.				Melakukan efisiensi sebagai bentuk partisipasi dalam konservasi energi untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.				Membangun sumber daya manusia yang berbudaya Pancasila dengan semangat sinergi "One Kalbe".				<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan para pekerja mendapatkan kesempatan yang sama, upah yang sama, dan diterima dengan baik tanpa melihat perbedaan. • Memastikan adanya kesempatan bagi kepemimpinan perempuan dan berpartisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan.

Sumber: (Kalbe, 2019, 2020, 2021,

KESIMPULAN

Sebagai inisiatif kepemimpinan yang disahkan oleh para pimpinan (chief executives), Global Compact berupaya menyejajarkan pengoperasian dan strategi bisnis di mana pun dengan sepuluh prinsip yang telah diterima secara universal di bidang hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan gerakan anti-korupsi. Melalui spektrum yang luas dari pekerjaan khusus, sarana manajemen, sumberdaya, serta program-program dengan topic tertentu, UN Global Compact berupaya memajukan dua tujuan pelengkap yaitu: (1) Mengarusutamakan kesepuluh prinsip ke dalam kegiatan usaha di seluruh dunia; dan (2) Mengkatalisasikan tindakan untuk mendukung tujuan PBB yang lebih luas, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium (MDG).

Dengan demikian, dunia usaha, sebagai agen utama yang mendorong globalisasi, dapat membantu memastikan adanya perkembangan pasar, perdagangan, teknologi dan keuangan yang dapat memberi manfaat ekonomi dan sosial dimanapun serta membantu terciptanya perekonomian global yang lebih inklusif dan berkelanjutan. PT Kalbe Farma sebagai salah satu perusahaan multinasional Indonesia yang menjadi anggota 'active' UN Global Compact turut mengadopsi norma dan standar dengan mutual learning dari kesepuluh prinsip UNGC dibuktikan dengan Communication on Progress pada tahun 2019 hingga 2022. Dapat disimpulkan bahwa, peristiwa yang terjadi antara PT Kalbe Fama Tbk dan sebuah platform kebijakan dan kerangka kerja praktis untuk perusahaan yang berkomitmen untuk mempertahankan dan bertanggungjawab atas praktek bisnisnya yaitu United Nations Global Compact adalah implementasi sebuah Global Public Private Partnership yang memiliki tujuan yaitu berkomitmen untuk mematuhi standar bisnis melalui proses pembelajaran bersama norms and standard.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, terutama karena penulis hanya melakukan observasi dan evaluasi yang dilakukan melalui situs web dan platform media sosial resmi United Nations dan PT Kalbe Farma Tbk. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk menganalisis menggunakan media yang lebih luas. Selain itu, penulis juga

berharap kedepannya lebih banyak lagi perusahaan Indonesia yang menerapkan Global Public Private Partnership dan mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- A. Saeful Bahri, Badawi, Muhammad Hasan, & Opan Arifudin. (2021). *Pengantar Penelitian Pendidikan Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis*. Widinia Bhakti Persada Bandung.
- Andi Sufrina Nur Utami. (2019). Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) sebagai Strategi Tiongkok Membentuk Confidence Building Measure di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Studi Diplomasasi Dab Keamanan*, 2(2), 1–18.
- Baumann-Pauly, D., & Scherer, A. G. (2013). The Organizational Implementation of Corporate Citizenship: An Assessment Tool and its Application at UN Global Compact Participants. *Journal of Business Ethics*, 117(1), 1–17. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1502-4>
- Berliner, D., & Prakash, A. (2015). “Bluewashing” the Firm? Voluntary Regulations Program Design, and Member Compliance with the United Nations Global Compact. *The Policy Studies Journal*, 43, 115–138.
- Bull, B., & McNeill, D. (2007). *Development Issues in Global Governance: Public- Private Partnership and Market Multilateralism*. Routledge.
- Bull, B., & McNeill, D. (2019). From market multilateralism to governance by goal setting: SDGs and the changing role of partnerships in a new global order. *Business and Politics*, 21(4), 464–486. <https://doi.org/10.1017/bap.2019.9>
- Farquharson, E., Torres de Mästle, C., & Yescombe, E. R. (2011). *How to Engage with the Private Sector in Public-Private Partnerships in Emerging Markets*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7863-2>
- FCCO Construction. (n.d.). *The ten principles of the United Nations Global Compact*. Madrid:FCC. Retrieved November 12, 2023, from <https://www.fcco.com/en/sustainability/community/ten>

Global Compact Network Canada. (2019). *Corporate sustainability strats with a company's value system and a principles-based approach to doing business.*

<https://www.globalcompact.ca/about/ungc-10-principles/>

Gonzales-Perez, M. A., & Leonardo, L. J. (2017). The UN Global Compact.

Research Handbook on Transnational Companies, 177–138.

IOE. (2020). *United Nations Global Compact*. Geneva: International Organizations of Employers.

<https://www.ioe-emp.org/international-organisations/united-nations-global-compact>

Kalbe. (2019). *Together Building a Healthy Nation: 2019 Sustainability Report*. Kalbe. (2020).

Together, Building A Healthy Nation: 2020 Sustainability Report. Kalbe. (2021). *Together,*

Building A Healthy Nation: 2021 Sustainability Report. Kalbe. (2022a). *Laporan Tahunan 2022*

Annual Report.

Kalbe. (2022b). *Recover Together for Healthier Nation: 2022 Sustainability Report*. Kalbe Farma, P.

(2023). *Tentang Kami*. <https://www.kalbe.co.id/id/tentang-kami>

Kell, G. (2013). 12 Years Later. *Business & Society*, 52(1), 31–52.

<https://doi.org/10.1177/0007650312460466>

Kell, G., Slaughter, A. M., & Hale, T. (n.d.). Silent reform through the Global Compact. *UN*

Chronicle, 44, 26–30.

Partnership British Columbia. (2003). *An Introduction to Public Private*

Partnerships.

Purnomo, W., Rudiany, N. P., & Hennida, C. (2017). Private actor accountability on international regimes. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 30(4), 323.

<https://doi.org/10.20473/mkp.V30I42017.323-332>

- Rasche, A. (2020). *Research Handbook of Responsible Management* (O. Laasch, R. Suddaby, R. E. Freeman, & D. Jamali, Eds.). Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781788971966>
- UNGC. (2023a). *SDGs explained for business*. United Nations.
<https://www.unglobalcompact.org/sdgs>
- UNGC. (2023b). *The ten principles of the UN Global Compact*. United Nations.
<https://www.org/what-is-gc/mission/principles>
- UNGC. (2023c). *United Nations Global Compact*. United Nations.
<https://www.unglobalcompact.org/>
- UNGC. (2023d). *What is GC*. United Nations. <https://www.unglobal-compact.org/what-is-gc>
- United Nations Global Compact. (2023). *About the UN Global Compact*.
<https://unglobalcompact.org/about/faq>
- Voegtlin, C., & Pless, N. M. (2014). Global Governance: CSR and the Role of the UN Global Compact. *Journal of Business Ethics*, 122(2), 179–191. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2214-8>
- Vogel, D. (2008). Private Global Business Regulation. *Annual Review of Political Science*, 11(1), 261–282. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053106.141706>
- Waddock, S. (2008). Building a New Institutional Infrastructure for Corporate Responsibility. *Academy of Management Perspectives*, 22(3), 87–108.
<https://doi.org/10.5465/amp.2008.34587997>
- Wang, H., & Miao, L. (2023). *Strategies for Chinese Enterprises Going Global* (H. Wang & L. Miao, Eds.). Springer Nature Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-6120-5>